

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Hubungan Internasional telah melalui perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir, tidak hanya fokus pada konflik antar negara upaya hegemoni militer saja. Saat ini, bidang ini memberikan lebih banyak kesempatan untuk menganalisis partisipasi aktor non-negara, kerjasama multilateral, dan diplomasi yang berlandaskan budaya serta nilai-nilai politik sosial¹. Isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, dan migrasi menunjukkan bahwa pendekatan realistis tidak selalu mampu menjawab kompleksitas dunia kontemporer². Karena itu, pandangan liberal dan konstruktivis semakin menguasai diskusi akademis, termasuk dalam menganalisis hubungan diplomatik yang dibentuk melalui bidang-bidang non-tradisional seperti pariwisata. Perubahan ini menunjukkan transformasi fungsi peran negara dari kekuatan yang memaksa menjadi aktor yang memanfaatkan pengaruh melalui minat dan kolaborasi. Diplomasi, sebagai instrumen hubungan internasional, juga telah menyesuaikan konsepnya dari pendekatan hard power ke arah soft power³. Konsep soft power diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Nye sebagai bentuk kekuatan yang tidak bergantung pada paksaan, tetapi lebih kepada daya tarik budaya, prinsip-prinsip politik, dan legitimasi kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam konteks ini, diplomasi pariwisata muncul sebagai salah satu bentuk nyata dari diplomasi lunak, di mana negara memanfaatkan sektor pariwisata untuk memperkenalkan identitas nasional dan membangun persepsi internasional yang positif.

¹ Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (Eds.). (2019). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (9th ed.). Oxford University Press.

² Reus-Smit, C. (2020). *Culture and Order in World Politics*. Cambridge University Press.

³ Melissen, J. (Ed.). (2005). *The new public diplomacy: Soft power in international relations*. Palgrave Macmillan. <https://docslib.org/doc/5067742/the-new-public-diplomacy-soft-power-in-international-relations>

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan potensi ekonomi, tetapi juga memperluas jaringan kerja sama bilateral dan regional secara damai. Negara-negara berusaha menarik perhatian wisatawan agar berkunjung ke destinasi mereka, mengingat bahwa pariwisata dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan jika dikelola dengan baik.⁴

Menurut data dari World Tourism Organization (WTO) yang di publish pada tahun 2001, total wisatawan internasional mencapai 698 juta orang dengan penghasilan sebesar USD 476 miliar. Di tahun 90-an, jumlah pengunjung tumbuh sekitar 4,2%, sementara pendapatan dari wisatawan asing naik menjadi 7,3%. Di 28 negara di dunia, sektor pariwisata tumbuh pesat, hampir 15% setiap tahun. Ini juga menyumbang sekitar 37% pada perdagangan internasional di sektor jasa. Diprediksi pada tahun 2020, jumlah orang yang berwisata bisa mencapai 1,602 miliar, dengan 231 juta orang kemungkinan besar akan liburan di Asia Timur dan Pasifik⁵.

Ini menunjukkan sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor utama dalam perdagangan internasional di bidang jasa. Di kawasan Asia Tenggara, pariwisata menjadi salah satu sumber devisa utama, memberikan kontribusi antara 10-12% terhadap PDB serta menyerap 7-8% dari total tenaga kerja⁶. Hal ini menunjukkan bahwa prospek pariwisata sangat menguntungkan dan menawarkan berbagai peluang yang luas. Pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, pariwisata tidak hanya terbatas pada pengembangan area wisata, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan penyediaan layanan di negara tersebut. Dalam

⁴ Universitas Pasundan. (n.d.). https://repo.fisip.unpas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=699&keywords=

⁵ World Tourism Organization. (2001). *Tourism Market Trends 2001: World Overview & Tourism Topics*. Madrid: WTO.

⁶ Trupp, A., et al. (2024). Guest editorial: The study of tourism in Southeast Asia—ongoing trends and future directions. *South East Asia: A Multidisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.1108/seamj-08-2024-088>

konteks ini, pariwisata memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi di negara tersebut⁷.

Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang kompleks di suatu negara, diperlukan implementasi diplomasi pariwisata yang efektif agar dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut. Secara umum, diplomasi adalah praktik dan prosedur yang dijalankan oleh suatu negara dalam melaksanakan proses negosiasi, perundingan, dan perjanjian. Hal ini dilakukan oleh diplomat yang mewakili negara. Tertentu untuk mencapai kepentingan nasional yang diinginkan⁸. Diplomasi diartikan sebagai metode yang diadopsi negara untuk mengejar kepentingan nasional melalui perwakilan yang ditunjuk. Seiring dengan perkembangan waktu, pendekatan diplomasi yang pada awalnya sering dikaitkan dengan konflik bersenjata telah bertransformasi menjadi strategi yang lebih bersifat persuasif, yaitu *soft power*⁹. Menurut Joseph Nye, *soft power* merupakan kemampuan untuk meraih pengaruh tanpa paksaan, melainkan melalui cara yang lebih meyakinkan. Berbagai bentuk diplomasi yang saat ini ada mencakup diplomasi publik, ekonomi, budaya, olahraga, dan kuliner, menunjukkan diversifikasi dalam praktik diplomasi modern.

Banyak negara yang memanfaatkan *soft diplomacy* sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara serta kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan ini lebih efektif dalam memperkenalkan citra budaya suatu negara. Salah satu keunggulan *soft diplomacy* adalah kemampuannya untuk mempengaruhi pihak lain agar

⁷ Aini, Y. N. (2024). Sustainable tourism in Southeast Asia: Balancing economic growth, employment, and carbon emissions through evidence-based strategies. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 18(1), 157–174. doi:10.47608/jki.v18i1

⁸ Rozanah, A., & Ishqila, N. A. (2024). The influence of public diplomacy in G20 2022 Summit in Indonesia's post-pandemic tourism and ecotourism recovery efforts. *Journal of Social Political Sciences*, 5(1), 45-56. <https://doi.org/10.52166/jsps.v5i1.221>

⁹ Tourism for Global Connectivity and Economic Development. FlipHTML5, n.d., https://fliphtml5.com/rkalm/umbm/TOURISM_FOR_GLOBAL_CONNECTIVITY_AND_ECONOMIC_DEVELOPMENT. Diakses 23 Juli 2025.

bersedia bekerja sama dan meningkatkan perekonomian melalui pendekatan yang berbasis budaya dan nilai-nilai sosial, tanpa menerapkan paksaan. Selain itu, soft diplomacy memungkinkan sebuah negara untuk menjalin komunikasi yang aman dan harmonis dengan negara lain. Hal ini penting, mengingat bahwa sebuah negara tidak dapat mencapai kemajuan dalam teknologi, ekonomi, budaya, atau kegiatan ekspor-impor tanpa dukungan dan kolaborasi dari negara lain¹⁰.

Salah satu negara yang memanfaatkan soft diplomacy untuk meningkatkan sektor pariwisatanya adalah Thailand. Negara ini terletak di kawasan Asia Tenggara dan terbagi menjadi 77 provinsi, dengan Bangkok sebagai ibu kotanya, yang berfungsi sebagai pusat berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, politik, pariwisata, dan industri. Melihat perkembangan yang terjadi, Thailand merupakan negara dengan destinasi pariwisata yang telah mengalami kemajuan signifikan. Thailand telah menjadikan pariwisata sebagai bagian integral dari kebijakan luar negerinya. Bangkok, Chiang Mai, dan Phuket menjadi simpul utama kegiatan wisata dan diplomasi budaya Thailand. Pemerintah menyadari bahwa kemudahan akses merupakan faktor penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan, khususnya dari pasar utama seperti Tiongkok. Oleh karena itu, pemberlakuan kebijakan bebas visa untuk warga negara Tiongkok pada 25 September 2023, dan kemudian diresmikan secara permanen mulai Maret 2024, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi.

Hubungan antara Thailand dan Tiongkok telah mengalami peningkatan yang konsisten sejak mereka menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1975. kerja sama di berbagai sektor terus diperluas, mencakup perdagangan, pendidikan, keamanan, dan

¹⁰ Carbó-Catalan, E., & Roig Sanz, D. (Eds.). (2022). *Culture as Soft Power: Bridging Cultural Relations, Intellectual Cooperation and Cultural Diplomacy*. De Gruyter.

pertukaran antar masyarakat. Dalam sektor pariwisata, Tiongkok merupakan pasar utama untuk Thailand, dengan lebih dari 10 juta wisatawan yang berkunjung pada tahun 2019. Oleh karena itu, langkah Thailand dalam mengimplementasikan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok bukan hanya kebijakan teknis administratif, tetapi juga upaya simbolik untuk memperdalam ikatan diplomatik kedua negara. Pada September 2023, Thailand mengimplementasikan kebijakan bebas visa untuk warga negara China, yang merupakan salah satu langkah strategis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata negara tersebut. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan jumlah wisatawan China yang mengunjungi Thailand, sebuah pasar wisata yang besar dan terus berkembang. Seiring dengan kebijakan ini, Thailand berharap dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata yang terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19, serta memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan China. Sebagai destinasi wisata utama di Asia Tenggara, Thailand memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak turis, khususnya dari China, yang telah menjadi salah satu negara pengirim wisatawan terbesar¹¹.

Thailand telah lama menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan China. Pada tahun 2019, Thailand tercatat menerima sekitar 40 juta wisatawan, dengan turis China mendominasi jumlah kedatangan tersebut. Negara-negara lain di Asia Tenggara yang menerapkan kebijakan serupa, seperti Malaysia dan Singapura, telah merasakan dampak positif dari penghapusan visa bagi wisatawan China. Misalnya, Malaysia mencatatkan peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan China, dengan tambahan 1,18 juta orang setelah menghapuskan visa untuk wisatawan China yang tinggal kurang dari 30 hari. Dengan memanfaatkan potensi besar ini, Thailand berupaya untuk menarik lebih banyak wisatawan, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian,

¹¹ Interesse, G. (2024). *China and Thailand to Waive Visa Requirements Permanently from March*. China Briefing.

khususnya sektor pariwisata.

Sebelum penerapan kebijakan bebas visa pada September 2023, Thailand mengalami penurunan jumlah kedatangan wisatawan China yang signifikan. Pada periode Januari hingga Juni 2023, hanya tercatat sekitar 1,4 juta turis asal China, jauh di bawah target yang diperkirakan antara 3 hingga 5 juta kedatangan sepanjang tahun tersebut¹². Dengan kebijakan ini, Thailand berharap dapat meraih kembali angka kunjungan yang tinggi, setelah terus menerun dampak dari pandemi COVID-19. Setelah kebijakan bebas visa diterapkan pada 25 September 2023, jumlah wisatawan China yang datang ke Thailand mengalami lonjakan yang signifikan. Hingga akhir 2023, jumlah wisatawan China diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta orang¹³, menunjukkan keberhasilan kebijakan tersebut dalam menarik wisatawan dan memberikan dorongan besar terhadap sektor pariwisata Thailand.

Pada periode Januari hingga April 2024, lebih dari 2 juta turis China diperkirakan telah mengunjungi Thailand, dan tren positif ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan berlanjutnya kebijakan bebas visa dan tingginya permintaan wisatawan untuk perjalanan selama liburan Tahun Baru Imlek¹⁴. Peningkatan ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan akses yang lebih mudah bagi wisatawan China dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Thailand. Dengan jumlah wisatawan yang semakin meningkat, Thailand semakin berpotensi untuk memanfaatkan pasar besar ini dan meraih keuntungan ekonomi yang signifikan dari sektor pariwisata.

¹² THAILAND: Visa-free policy for Chinese tourists introduced. (2023). *HKTDC*.

<https://research.hktdc.com/en/article/MTUxNjUzODI00Q>

¹³ Huaxia. (2024, January 28). China, Thailand to enter "visa-free era," says Chinese FM. *Xinhua*.

<https://english.news.cn/20240128/d574bf62f149493c993a19078d2ca5ad/c.html>

¹⁴ Interesse, G. (2024). *China and Thailand to Waive Visa Requirements Permanently from March*. China Briefing. <https://www.china-briefing.com/news/china-and-thailand-to-waive-visa-requirements-permanently-from-march/>

Masyarakat Tiongkok seringkali memiliki pandangan yang negatif terhadap negara lain, dan keputusan mereka untuk berkunjung biasanya dipengaruhi oleh informasi Mereka cenderung yakin bahwa dengan adanya promosi dan rekomendasi dari pemerintah, kualitas suatu destinasi sudah terjamin. Selain itu, pengalaman dari wisatawan lain juga sangat berpengaruh mereka biasanya mencari tahu testimoni dari pengunjung yang sudah datang sebelumnya, dan jika terdapat kesan yang kurang menyenangkan atau muncul keraguan, kemungkinan besar mereka akan membatalkan niat untuk berkunjung. Dalam rangka mengubah citra pariwisata, pemerintah Thailand berupaya menciptakan suasana baru untuk kunjungan ke negara mereka, yang tidak lagi berfokus pada sektor seks. Mereka mulai mengembangkan pariwisata yang ramah keluarga, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan keluarga. Wisatawan asal Tiongkok dikenal memiliki kebiasaan berlibur bersama keluarga, sehingga mereka lebih memilih destinasi yang sesuai untuk liburan kelompok. Meskipun wisatawan dari Tiongkok masih merasa khawatir tentang negara tujuan mereka, khususnya Thailand, pemerintah Thailand bertekad untuk menjalankan diplomasi yang efektif demi menarik lebih banyak wisatawan dari Tiongkok ke negara mereka.

Hubungan Thailand dan Tiongkok telah mengalami penguatan yang stabil sejak pembentukan hubungan diplomatik pada tahun 1975. Kerja sama di berbagai bidang terus ditingkatkan, mulai dari perdagangan, pendidikan, pertahanan, hingga pertukaran masyarakat. Dalam hal pariwisata, Tiongkok adalah pasar terbesar bagi Thailand, dengan kontribusi lebih dari 10 juta wisatawan pada tahun 2019. Oleh karena itu, langkah Thailand dalam bebas visa bagi wisatawan Tiongkok bukan hanya kebijakan teknis administratif, tetapi juga upaya simbolik untuk memperdalam ikatan diplomatik kedua negara. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kontraksi besar terhadap arus wisatawan global, termasuk hubungan Thailand–Tiongkok. Selama dua tahun berturut-turut, jumlah wisatawan

menurun drastis akibat penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan internasional. Pemerintah Thailand merespons dengan kebijakan pemulihan pariwisata seperti program "Amazing Thailand", perluasan digitalisasi pariwisata, dan pelonggaran visa. Implementasi kebijakan bebas visa secara permanen menjadi simbol pemulihan sekaligus bagian dari strategi diplomasi pariwisata yang lebih progresif.

Xinhua adalah kantor berita resmi milik pemerintah Tiongkok yang menyampaikan informasi sesuai dengan kebijakan dan pandangan negara. Media ini sering digunakan untuk menyebarkan narasi resmi dan diplomasi Tiongkok ke dalam dan luar negeri. Menurut laporan Xinhua, kebijakan ini diperkirakan mampu mendongkrak jumlah wisatawan Tiongkok menjadi lebih dari delapan juta orang pada tahun 2024. Selain mendatangkan devisa, kehadiran wisatawan Tiongkok memperkuat koneksi budaya dan meningkatkan pengaruh Thailand dalam membentuk persepsi global. Dalam perspektif soft power, kedekatan psikologis dan pengalaman wisatawan menjadi sumber daya yang dapat dikonversi menjadi reputasi internasional positif. Pariwisata dalam hal ini bertindak sebagai wahana pertukaran nilai dan promosi identitas nasional. Di sisi lain, diplomasi bebas visa mendorong pertumbuhan interaksi masyarakat yang lebih luas, memperkuat hubungan people-to-people. Banyak lembaga pendidikan dan institusi pelatihan pariwisata di Thailand kini mengintegrasikan kursus bahasa Mandarin untuk meningkatkan layanan terhadap wisatawan Tiongkok. Hubungan sosial lintas budaya semakin intensif, menciptakan lingkungan diplomatik yang bersifat non-formal dan jangka panjang. Hal ini menjadikan kebijakan bebas visa sebagai strategi multifungsi: ekonomi, budaya, dan sosial.

Kebijakan bebas visa juga memperkuat posisi Thailand sebagai simpul penting dalam Belt and Road Initiative (BRI). Konektivitas antarwilayah yang didorong oleh proyek infrastruktur Tiongkok mendapat dukungan dari kemudahan mobilitas manusia. Thailand berperan sebagai mitra regional dalam menghubungkan Asia Tenggara dengan

daratan Tiongkok melalui jalur darat dan udara. Dengan demikian, diplomasi pariwisata tidak berdiri sendiri, tetapi berkontribusi pada geopolitik kawasan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
Bagaimana kebijakan bebas visa mampu memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi antara Thailand dan China?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana diplomasi kebijakan bebas visa mampu memperkuat hubungan diplomatik dan Kerjasama antara Thailand dan China.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari hasil penelitian ini diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam perspektif teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori diplomasi publik, khususnya dalam konteks diplomasi bilateral Thailand – china dengan diplomasi global. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya studi mengenai soft power serta strategi diplomasi internasional yang digunakan oleh thailand. Dengan menganalisis bagaimana diplomasi bilateral pada sektor pariwisata berfungsi sebagai instrumen untuk membangun hubungan bilateral dan menciptakan citra positif thailand di mata dunia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran simbolisme budaya dalam diplomasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang diplomasi bilateral pada pariwisata sebagai simbol keterhubungan Thailand dengan diplomasi global. Penelitian ini dapat membantu memperluas wawasan mengenai peran diplomasi Thailand dalam membentuk persepsi masyarakat China, serta meningkatkan pemahaman tentang konsep soft power yang diterapkan melalui simbolisme budaya. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi dan literatur yang relevan mengenai strategi diplomasi internasional yang digunakan Thailand.

